

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Auditing sebagai suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan (Mulyadi, 2002:9) dalam (Kadhafi *dkk.*, 2014). Pengawasan terhadap penggunaan dana pemerintah daerah dilakukan oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) sebagai pelaksana tugas kepada Negara/Undang-undang.

Dalam pelaksanaan tugas pengawasan terhadap penggunaan dana pemerintah daerah yang dilakukan oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah), umumnya tujuan utamanya adalah untuk memberikan saran dan rekomendasi kepada manajemen pemerintah daerah dengan lebih menekankan pada kegiatan pencegahan dan memberikan jasa konsultasi. APIP memberikan rekomendasi kepada penyelenggara pemerintahan, baik pusat maupun di daerah mengenai hasil, hambatan, dan penyimpangan yang terjadi atas aktivitas yang sudah dijalankan oleh instansi pemerintah.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/05/M.PAN/03/2008 menyatakan bahwa Pengawasan intern

pemerintah merupakan fungsi manajemen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui pengawasan intern dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan rencana, kebijakan yang telah ditetapkan, dan ketentuan. Selain itu, pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan untuk mendorong terwujudnya *good governance* dan *clean government* dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel serta bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (Salsabila dan Prayudiawan, 2011).

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), menurut (Mardiasmo, 2005) dalam (Wiraswasti *dkk.*, 2014) terdapat tiga aspek penting yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pihak di luar eksekutif, yaitu masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengawasi kinerja pemerintahan. Pengendalian adalah mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif untuk menjamin bahwa sistem dan kebijakan manajemen dilaksanakan dengan baik sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Sedangkan pemeriksaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Pengawasan intern di lingkungan Departemen, Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dan Inspektorat Utama/Inspektorat untuk kepentingan Menteri/Pimpinan LPND dalam upaya pemantauan terhadap kinerja unit organisasi yang ada dalam kendalinya. Pelaksanaan fungsi Inspektorat Jenderal dan Inspektorat Utama/Inspektorat tidak terbatas pada fungsi audit tapi juga fungsi pembinaan terhadap pengelolaan keuangan negara. Pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Inspektorat Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk kepentingan Gubernur/Bupati/Walikota dalam melaksanakan pemantauan terhadap kinerja unit organisasi yang ada di dalam kepemimpinannya. Sedangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang berada di bawah Presiden melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Salsabila dan Prayudiawan, 2011).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 Pasal 4 menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan, inspektorat provinsi, kabupaten/kota mempunyai fungsi yaitu perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan, dan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan (Wirasusati *dkk.*, 2014).

Kualitas audit pada sektor publik adalah probabilitas seorang pemeriksa atau auditor pemerintah dapat menemukan dan melaporkan

suatu penyelewengan yang terjadi pada suatu instansi atau pemerintah (baik pusat maupun daerah). Pelaksana audit pada lembaga pemerintah bertujuan untuk menjamin dilakukannya pertanggungjawaban publik oleh pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pusat serta perusahaan-perusahaan milik Negara (Nurlaeli, 2010) dalam (Primastuti dan Suryandari, 2014). Kualitas audit sangat penting dalam kegiatan audit, karena dengan kualitas audit yang tinggi maka akan dihasilkan laporan hasil pemeriksaan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan (Resuman, 2011) dalam (Adriyani *dkk.*, 2013). Dan dengan keahlian yang dimiliki oleh pemeriksa maka pengawasan yang dilakukan oleh APIP akan menghasilkan laporan yang berkualitas.

Independensi auditor merupakan salah satu faktor yang penting untuk menghasilkan audit yang berkualitas. Karena jika auditor kehilangan independensinya, maka laporan audit yang dihasilkan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan (Supriyono, 1988) dalam (Ahmad *dkk.*, 2011). Dari penelitian yang dilakukan (Samsi *dkk.*, 2013) diketahui bahwa independensi berpengaruh positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Hal ini berarti bahwa kualitas audit dapat dicapai jika auditor memiliki independensi dalam melaksanakan tugas auditnya.

(Kadhafi, *dkk.*, 2014) telah melakukan penelitian tentang pengaruh independensi terhadap kualitas hasil pemeriksaan di lingkungan pemerintah daerah dan hasilnya adalah positif. Hal ini menunjukkan

bahwa kualitas audit dapat dicapai jika auditor memiliki independensi dalam melakukan audit.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas audit adalah *time budget pressure* (tekanan anggaran waktu). Menurut (Waggoner *et.al*, 1991) dalam (Hutabarat, 2012), jika alokasi waktu untuk penugasan tidak cukup, maka auditor mungkin mengkompensasikan dengan kerja mereka dengan cepat, dan hanya menyelesaikan tugas-tugas yang penting saja sehingga mungkin menghasilkan kinerja yang tidak efektif. (Dezoort, 1998) dalam (Hutabarat, 2012) menyatakan bahwa adalah hal yang umum ditemukan bahwa di bawah tekanan anggaran waktu, individu cenderung akan bekerja dengan cepat sehingga akan berdampak pada penurunan kinerjanya. *Time budget pressure* akan memberikan pengaruh yang negatif terhadap kualitas pekerjaan audit.

Faktor skeptisisme professional auditor juga dapat berpengaruh terhadap kualitas audit. Semakin skeptis seorang auditor maka akan semakin mengurangi tingkat kesalahan dalam melakukan audit (Nelson, 2007; Hurrt *et al*, 2003; Bell *et al*, 2005) dalam (Queena dan Rohman, 2012). (Carpenter *et al*, 2002) dalam (Queena dan Rohman, 2012) menyatakan bahwa auditor yang kurang memiliki sikap skeptisisme professional akan menyebabkan penurunan kualitas audit.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAR) PER/05/M.PAN/03/2008 menyebutkan bahwa kualitas auditor dipengaruhi oleh kepatuhan pada kode etik. Kode etik auditor adalah

norma yang harus dipatuhi oleh auditor. Maksud dibuatnya kode etik ini adalah untuk tersedianya pedoman bagi auditor untuk memberi arah profesi, menegakkan kebenaran dan memelihara tingkah laku (Pergub Aceh No. 91/2009 pasal 2 ayat 1). (Kadhafi., *dkk*, 2014)

Sesuai dengan standar umum dalam Standar Profesional Akuntan Publik bahwa auditor disyaratkan memiliki pengalaman kerja yang cukup dalam profesi yang ditekuninya, serta dituntut untuk memenuhi kualifikasi teknis dan berpengalaman dalam industri-industri yang mereka audit (Arens *dkk.*, 2004) dalam (Samsi *dkk.*, 2013). Pengalaman juga memberikan dampak pada setiap keputusan yang diambil dalam pelaksanaan audit sehingga diharapkan setiap keputusan yang diambil merupakan keputusan yang tepat. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin lama masa kerja yang dimiliki auditor maka auditor akan semakin baik pula kualitas audit yang dihasilkan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Queena dan Rohman, 2012) menemukan bukti empiris bahwa pengalaman kerja, etika dan skeptisisme profesional auditor berpengaruh positif atau signifikan terhadap kualitas audit. Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ramsi, *dkk.*, 2013) yang menemukan bukti empiris bahwa pengalaman kerja, independensi dan etika auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan.

Berdasarkan temuan-temuan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ulang, untuk mendapatkan data empiris apakah variabel-variabel tersebut memiliki hubungan positif dan signifikan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji apakah ada pengaruh independensi, *time budget pressure*, skeptisisme profesional auditor, etika auditor dan pengalaman kerja auditor terhadap kualitas hasil pemeriksaan auditor Pemerintah Daerah Se-Eks Karesidenan Surakarta serta seberapa besar pengaruhnya terhadap kualitas hasil pemeriksaan tersebut.

Penelitian ini nanti merupakan pengembangan dari penelitian (Queena dan Rohman, 2012). Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian sebelumnya terdapat pada penambahan variabel independensi, *time budget pressure*, pengalaman kerja auditor dan tempat penelitian yang berbeda.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka judul penelitian ini adalah **“PENGARUH INDEPENDENSI, *TIME BUDGET PRESSURE*, SKEPTISISME PROFESIONAL AUDITOR, ETIKA AUDITOR, DAN PENGALAMAN KERJA AUDITOR TERHADAP KUALITAS HASIL PEMERIKSAAN AUDITOR PEMERINTAH DAERAH” (Survai Pada Inspektorat Kota/Kabupaten Se-Eks Karesidenan Surakarta)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas, dapat dirumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah Independensi berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan auditor Pemerintah daerah?
2. Apakah *Time Budget Pressure* berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan auditor Pemerintah daerah?
3. Apakah Skeptisisme Profesional Auditor berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan auditor Pemerintah daerah?
4. Apakah Etika Auditor berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan auditor Pemerintah daerah?
5. Apakah Pengalaman Kerja Auditor berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan auditor Pemerintah daerah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh Independensi terhadap kualitas hasil pemeriksaan auditor Pemerintah daerah.
2. Untuk menganalisis pengaruh *Time Budget Pressure* terhadap kualitas hasil pemeriksaan auditor Pemerintah daerah.



3. Untuk menganalisis pengaruh Skeptisisme Profesional Auditor terhadap kualitas hasil pemeriksaan auditor Pemerintah daerah.
4. Untuk menganalisis pengaruh Etika Auditor terhadap kualitas hasil pemeriksaan auditor Pemerintah daerah.
5. Untuk menganalisis pengaruh Pengalaman Kerja Auditor terhadap kualitas hasil pemeriksaan auditor Pemerintah daerah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, manfaat yang diharapkan pada penelitian ini nanti adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang auditing, dan dapat memberikan bukti empiris mengenai pengaruh independensi, time budget pressure, skeptisisme profesional auditor, standar audit, dan pengalaman kerja dalam kualitas hasil pemeriksaan auditor Pemerintah Daerah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan informasi dan sebagai dasar pertimbangan dalam melantik auditor pemerintah yang berkerja di kantor Inspektorat sehubungan dengan kualitas hasil pemeriksaan sebagai bentuk pertanggung jawaban

keuangan pemerintah kepada masyarakat selaku pemilik dana dan pemilik kepentingan.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan informasi dan sebagai dasar pengawasan kepada pemerintah daerah dalam upaya untuk menjalankan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel serta bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme melalui pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah yang dilakukan oleh kantor Inspektorat.

c. Bagi Auditor Pemerintah daerah

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat sebagai pedoman, bahan pertimbangan dan bahan referensi bagi auditor Pemerintah daerah dalam melaksanakan proses auditnya terutama dalam hal kualitas hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Apakah laporan tersebut sudah disajikan secara wajar dan berdasarkan pada Prinsip Akuntansi yang Berterima Umum (PABU).

d. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti dan dapat lebih mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hasil pemeriksaan pemerintah daerah yang dilakukan oleh kantor Inspektorat.

e. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan referensi dalam melakukan penelitian yang sejenis dan dapat mengembangkan melalui keterbatasan-keterbatasan yang ada.

## **E. Sistematika Penulisan**

Penulisan dari penelitian ini di bagi kedalam lima bab yaitu :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah ,perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini akan menguraikan tentang tinjauan pustaka yang membahas mengenai konsep relevan yang mendukung dalam penelitian ini, antara lain: landasan teori, tinjauan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan perumusan hipotesis.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini membahas jenis penelitian, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, data dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional variabel, metode pengujian instrument, serta teknik analisis data.

#### BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Berisi penyajian dan analisis data, pada bab ini akan disajikan dan dijelaskan tentang pengumpulan, analisis data dan sekaligus merupakan jawaban atas hipotesis yang akan dikemukakan.

#### BAB V PENUTUP

Dalam bab ini akan dikemukakan simpulan dari bab-bab sebelumnya, keterbatasan penelitian, dan disertai dengan saran-saran yang diharapkan bisa digunakan sebagai dasar pertimbangan dan bermanfaat bagi pemerintah daerah, penulis, maupun pembaca.